

## ABSTRAK

JUDUL TESIS : Pelaksanaan Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah

NAMA MAHASISWA : Ronny

NIM : 217162026

KATA KUNCI : Pelaksanaan, Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan

ISI ABSTRAK :

Dalam proses pendaftaran hak tanggungan di Kantor Pertanahan, Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan merupakan salah satu dokumen persyaratan yang disertakan. Namun dalam pelaksanaannya tidak serta merta sesuai dengan peraturan yang ada, adanya penolakan terhadap Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan yang dibuat dengan akta notaris yang tidak sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Permasalahannya bagaimana pelaksanaan Pasal 15 (Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah dan bagaimana kepastian hukum bagi notaris dalam membuat Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan. Penulis menggunakan penelitian hukum empiris yakni dengan melakukan wawancara untuk menjawab permasalahan tersebut. Pelaksanaan Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah mengenai pembuatan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan oleh notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah tidak sepenuhnya dilaksanakan dalam praktiknya di lapangan. Kepastian hukum mengenai kewenangan notaris dalam membuat Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan telah diatur secara tertulis dan jelas dalam Pasal 15 Ayat (2) huruf f dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris juncto Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah.